

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Tribun Jateng
Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 9

Wali Kota Teken Dana Pilwakot Rp84 M

► Pemkot Tandatangani NPHD dengan KPU dan Bawaslu Kota Semarang

SEMARANG, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengucurkan dana sebesar Rp 84 miliar untuk gelaran pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020. Dana tersebut terbagi untuk

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebesar Rp 71,9 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang sebesar Rp 12,1 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2019

dan APBD Murni 2020 yang telah disepakati melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemkot Semarang dengan KPU dan Bawaslu Kota Semarang di kantor Wali Kota Semarang, Rabu

(25/9).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, Pemkot Semarang berkomitmen untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pilwakot 2020, satu di antaranya dengan mengang-

garkan APBD untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pilwakot 2020.

"Alokasi dana sudah dikunci dalam Kebijakan Umum Ang-

garan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tinggal pembahasan detail dan ditetapkan oleh dewan dalam Perda," tutur Hendi, sapaan akrabnya.

Hendi berharap, dana yang telah dikucurkan oleh Pemkot Semarang dapat digunakan sebaik-baiknya agar Pilwakot 2020 berjalan dengan lancar. Masyarakat juga harus terus diberikan sosialisasi terkait Pilwakot agar mereka turut berpartisipasi memilih pemimpin yang memiliki pemikiran visioner. Sehingga, Kota Semarang bisa lebih maju dan berkembang pesat.

"Dukung mendukung, saling bergerak untuk mencari suara itu pasti dilakukan calon. Jangan sampai langkah-langkah yang dipakai tidak berprinsip kesatuan. Itu yang harus dihindari," ujar Hendi.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, akan segera melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah penandatanganan NPHD.

Meski sebagian besar dana pelaksanaan Pilwakot dianggarkan tahun 2020, dia memastikan tahapan-tahapan yang harus dilalui pada 2019 ini dapat dilaksanakan. Sebab, sebanyak Rp 453 juta telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2019, sedangkan sisanya dianggarkan di APBD murni 2020. Sesuai peraturan

an Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Rp 453 yang dianggarkan tahun 2019 dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan, dana Pilwakot yang dianggarkan 2020 baru dapat dicairkan 14 hari setelah penetapan APBD 2020.

Selepas ini, Pihaknya akan mulai menyiapkan sosialisasi pendaftaran calon, perekrutan badan adhoc, dan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat.

"Kami pastikan tahapan sosialisasi dan pencalonan yang dilaksanakan 2019 tetap berjalan karena Pemkot juga menganggarkan pada APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 453 juta," jelasnya.

Sementara itu, Plh Ketua Bawaslu Kota Semarang, Oky Pitoyo Leksono mengatakan, Bawaslu juga akan mulai melaksanakan tahapan awal Pilwakot 2020 dengan perekrutan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) sekitar November 2019.

Panwascam akan mulai bekerja melakukan pengawasan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan KPU Kota Semarang yang rencananya dilaksanakan pada Desember mendatang.

"Pembentukam Panwascam nanti sekitar November. Setiap kecamatan akan ada tiga panwascam. Kemudian, mereka akan mengawasi perekrutan PPK," ucap Oky. (eyf)

STORY HIGHLIGHTS

- Pemkot Semarang mengucurkan dana sebesar Rp 84 miliar untuk gelaran Pilwakot Semarang 2020
- Anggaran bersumber dari APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020
- Dana yang telah dikucurkan oleh Pemkot Semarang diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya agar Pilwakot 2020 berjalan dengan lancar